
IMPLEMENTASI PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (PHBM) PADA PERUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKU HUTAN (KPH) JEMBER (STUDI KASUS PADA LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN (LMDH) WANA JAYA NEGARA DESA BADEAN KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)

Ahmad Subairi¹, Sukidin¹, Pudjo Suharso¹

¹Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember
e-mail: subaybayri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan implementasi PHBM pada LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Metode penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive area yaitu di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penentuan Subjek dan Informan penelitian yaitu menggunakan metode snowball sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PHBM pada LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean telah berjalan dengan baik dan telah termasuk dalam kategori LMDH madya. Program PHBM juga telah mampu memberikan dampak terhadap sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat yaitu kesempatan kerja masyarakat lebih tinggi, pendapatan masyarakat meningkat dan bagi hasil. Sedangkan dampak sosial yaitu pendidikan masyarakat menjadi lebih baik serta hubungan masyarakat dengan Perum Perhutani menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kata Kunci: Implementasi PHBM, Dampak Sosial dan Ekonomi

PENDAHULUAN

Perum Perhutani merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dalam mengatur dan mengelola sumberdaya hutan dengan baik. Salah satu prinsip dasar yang digunakan oleh Perum Perhutani dalam pengelolaan sumber daya hutan yaitu *Community Based Forest Management* (CBFM). CBFM merupakan salah satu pendekatan/konsep yang melibatkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan dengan tujuan mengedepankan kepentingan masyarakat. Perhutani dituntut untuk dapat mengelola sumberdaya hutan dengan baik agar dapat memberikan perhatian yang besar terhadap berbagai permasalahan di lingkungan hutan. Tak terkecuali terhadap kehidupan masyarakat yang hidup disekitar hutan. Tujuan pengelolaan sumberdaya hutan yaitu untuk memperluas kesempatan kerja, menjaga keanekaragaman hayati dan berusaha meningkatkan sumber devisa negara dengan tetap memperhatikan kepentingan rakyat sekitar hutan (Arief, 2001:16).

Desa Badean desa yang terletak di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Sehingga sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya terhadap sumberdaya hutan yang tersedia. Tidak sedikit masyarakat yang terpaksa melakukan penebangan liar untuk kemudian dijual agar mereka memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat juga seringkali berurusan dengan petugas Perhutani jika ketahuan melakukan penebangan liar, sehingga menyebabkan hubungan masyarakat dan petugas tidak baik.

Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan hutan seperti pencurian kayu, pembakaran hutan, pengembalaan hewan ternak secara bebas, serta berbagai permasalahan masyarakat desa hutan baik secara ekonomi, sosial dan budaya, membuat suatu kebijakan yaitu Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kebijakan atau program tersebut dibuat agar pemerintah bersama masyarakat ikut berperan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan

agar dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat terhadap masyarakat, terutama masyarakat di sekitar hutan dengan memadukan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Masyarakat diberikan pemberdayaan agar memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, dapat menjangkau segala sumber produktif serta dapat berkontribusi dalam pembangunan (Damanik, 2019:2). Dengan melibatkan masyarakat diharapkan tujuan pengelolaan sumberdaya hutan dapat terlaksana dengan baik serta hutan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat.

PHBM mulai diberlakukan setelah ditetapkannya SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136/KPTS/DIR/2001 tentang pelaksanaan PHBM. Pelaksanaan program PHBM ini merupakan bentuk pengelolaan dengan sistem kemitraan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang terhimpun dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH merupakan organisasi/lembaga kemitraan Perum Perhutani dalam mengelola sumberdaya hutan melalui sistem PHBM yang beranggotakan unsur lembaga desa dan masyarakat desa hutan. Lembaga tersebut merupakan suatu wadah bagi masyarakat lokal dalam mengelola dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan dalam konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya (Awang, dkk, 2008:13). Tujuan dibentuknya LMDH yaitu untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk bekerjasama dalam mengelola sumberdaya hutan yang adil dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program ini meliputi beberapa tahapan diantaranya yaitu sosialisasi, pembentukan kelembagaan LMDH, perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH dalam program PHBM. Setelah masyarakat menyetujui kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut barulah masyarakat dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Setelah masyarakat melaksanakan kegiatan yang telah disepakati bersama maka akan diadakan monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan dan untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan program (Rachmadi, 2010:10-11). Indikator keberhasilan program PHBM yaitu dilihat dari aspek perbaikan biofisik, aspek sosial yang meliputi peningkatan pendidikan masyarakat, dan aspek ekonomi yang dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat (SK Direksi Perum Perhutani No.682/KPTS/DIR/2009).

LMDH yang berada di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari mulai menerapkan program PHBM pada tahun 2006. Wilayah kerja LMDH ini meliputi seluruh wilayah kawasan hutan yang berada dalam wilayah administrasi Desa Badean. Program PHBM mulai dilaksanakan di Desa Badean setelah disetujuinya perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dan LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean. Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program PHBM ada dua yaitu kegiatan yang dilakukan didalam dan diluar hutan. Kegiatan didalam hutan berupa penanaman pokok maupun tanaman tumpangsari, pemeliharaan tanaman, serta penebangan tanaman. Sedangkan kegiatan diluar kawasan hutan berupa pemberdayaan masyarakat seperti pemberian pelatihan kewirausahaan, pelatihan manajemen kelembagaan, pembentukan badan usaha kerakyatan, dan perbaikan sarana dan prasarana.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mencapai tujuan program PHBM yaitu masyarakat diberikan hak petak lahan agar dapat dikelola oleh masyarakat untuk kegiatan bercocok tanam. Diharapkan dengan diberikannya hak pengelolaan petak lahan kepada masyarakat dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat baik secara sosial dan ekonomi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan implementasi PHBM pada LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan tahapan-tahapan implementasi PHBM pada LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari

Kabupaten Jember serta dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Metode penentuan lokasi penelitian menggunakan metode purposive area yaitu di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penentuan Subjek dan Informan penelitian yaitu menggunakan metode snowball sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Metode analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik dan sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Tahapan Implementasi PHBM

Kegiatan PHBM merupakan program yang di bentuk oleh Perum Perhutani pada tahun 2001. Dalam melaksanakan program PHBM terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar program tersebut dapat dilaksanakan dan dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Adapun tahapan tersebut yaitu diawali dengan sosialisai. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan tujuan mengenalkan program PHBM kepada masyarakat desa hutan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh pihak Perum Perhutani dengan mengumpulkan masyarakat di kantor kepala desa. Petugas Perum Perhutani juga melakukan pendekatan kepada *stakeholder* agar program tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas khususnya masyarakat desa hutan serta untuk mempermudah petugas dalam mensosialisasikan ke berbagai kalangan masyarakat. Sosialisasi sangatlah penting dilaksanakan karena pada tahapan ini merupakan proses awal program ini dilaksanakan dan proses pengenalan program kepada masyarakat agar program ini mendapat dukungan dari masyarakat serta agar masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan dengan mengenalkan program mulai dari latar belakang program, tujuan program dilaksanakan, manfaat program, serta kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut.

Pembentukan kelembagaan dilakukan setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan. Pembentukan kelembagaan masyarakat dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat serta agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Kelembagaan tersebut dinamakan sebagai Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dimana anggota dan pengurus dari lembaga tersebut merupakan masyarakat sekitar kawasan hutan. Pembentukan LMDH tersebut dilakukan secara bersama-sama antara pihak Perum Perhutani, pihak desa, dan warga Desa Badean. Pengurus LMDH dipilih dalam musyawarah tersebut yang kemudian dibuatkan Surat Keputusan (SK) mengenai pendirian LMDH oleh Kepala Desa yang juga diperkuat oleh aktenotaris. LMDH memiliki fungsi untuk menampung aspirasi masyarakat desa hutan dalam menjaga dan mengelola sumberdaya hutan, serta sebagai jembatan antara masyarakat dengan Perum Perhutani untuk melakukan koordinasi dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan.

Setelah LMDH terbentuk maka akan dilakukan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH. Perjanjian kerjasama program PHBM merupakan perjanjian kerjasama antara Perum Perhutani dengan LMDH dalam mengelola dan menjaga sumberdaya hutan. Perjanjian kerjasama tersebut dibentuk setelah masyarakat melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) atau nota kesepakatan yang ditandatangani oleh ketua LMDH dan pihak Perum Perhutani bahwa mereka menyetujui dan sanggup melaksanakan pengelolaan hutan dengan sistem PHBM. Kemudian Untuk memperkuat kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya hutan antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan maka dibuatlah Perjanjian Kerjasama (PKS). Untuk memperkuat kedudukan perjanjian kerjasama tersebut maka perjanjian kerjasama tersebut di notariskan. Surat perjanjian

kerjasama tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan PHBM dalam kawasan hutan pangkuan (*wengkon*) LMDH.

Masyarakat baru bisa melaksanakan kegiatan dan mendapatkan hak untuk mengelola petak lahan hutan setelah perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan. Pola kerjasama dalam kerjasama ini yaitu dengan pola kemitraan. Perum Perhutani sebagai pemilik lahan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH untuk dapat memanfaatkan lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Dimana setiap pihak diberikan hak dan kewajiban dalam kerjasama mengelola hutan. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan PHBM terbagi menjadi dua yaitu kegiatan yang dilakukan dalam kawasan hutan dan kegiatan diluar kawasan hutan. Adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat di dalam hutan diantaranya pembersihan lahan, penanaman tanaman pokok dan tanaman tumpangsari, perawatan tanaman, pemanenan tanaman tumpangsari, dan tebangan. Sedangkan kegiatan yang dilakukan di luar hutan yaitu pemberian pengetahuan kepada masyarakat tentang pengenalan kehutanan baik dalam menjaga dan merawat hutan serta cara perawatan tanaman hutan yang baik dan benar. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berinteraksi dengan hutan secara baik sehingga hutan dapat lestari dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi guna melihat dan mengetahui perkembangan program PHBM yang telah terlaksana di LMDH Wana Jaya Negara. Monitoring dilakukan dengan mendatangi LMDH dan melihat kawasan hutan pangkuan LMDH. Adapun aspek yang dinilai dalam kegiatan monitoring diantaranya, yaitu obyek atau kawasan hutan pangkuan, perkembangan LMDH, dan aksesibilitas. Hasil kegiatan evaluasi nantinya menentukan kategori tingkatan-tingkatan LMDH. Adapun tingkatan LMDH yaitu tingkatan mula, muda, madya, dan mandiri.

Hasil evaluasi yang telah dilakukan pada LMDH Wana Jaya Negara masuk dalam tingkatan LMDH madya, dimana administrasi di LMDH sudah baik, mempunyai rencana kegiatan, dan pengurus sudah menguasai wilayah administratif LMDH. Selain itu, aksesibilitas di kawasan hutan sudah cukup baik karena sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda empat. Kawasan hutan sudah aman dari penjarahan dan pencurian kayu, serta pengembalaan ternak secara liar.

2. Dampak Implementasi PHBM

A. Dampak Ekonomi

Salah satu tujuan dari program PHBM yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa setelah adanya program PHBM kehidupan masyarakat hutan Desa Badean berubah. Dengan adanya program PHBM lapangan pekerjaan bagi masyarakat bertambah banyak. Dalam kegiatan PHBM masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh pekerjaan seperti kegiatan pembersihan lahan, penanaman, pemupukan, perawatan tanaman, pemanenan, dan tebangan. Meskipun pekerjaan tersebut sudah biasa mereka lakukan akan tetapi setelah adanya program PHBM intensitas mereka dalam bekerja lebih tinggi. Biasanya dalam pekerjaan tersebut masyarakat diberi upah Rp35.000,00 – Rp50.000,00. Pekerjaan tersebut biasanya dilakukan mulai dari jam 07.00 - 13.00. Sedangkan untuk kegiatan tebangan merupakan kegiatan dari Perum Perhutani, dalam kegiatan tebangan biasanya masyarakat memperoleh upah sebesar Rp10.000,00 – Rp20.000,00. Upah tersebut diberikan sesuai dengan perolehan tebangan pohon yang mereka lakukan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, masyarakat diperbolehkan menanam tanaman kacang-kacangan dan jagung ketika tanaman pokok masih berumur 1-3 tahun. Hal tersebut agar tanaman tumpangsari masyarakat tidak merusak tanaman pokok Perum Perhutani. Setelah tanaman pokok berumur lebih dari 3 tahun barulah masyarakat diperbolehkan menanam tanaman yang bisa hidup dibawah tegakan seperti kopi.

Sebagian besar masyarakat di Desa Badean menanam tanaman kacang-kacangan dan jagung ketika tanaman pokok masih berumur 1-3 tahun. Sedangkan setelah tanaman pokok berumur sekitar 3 tahun lebih masyarakat biasanya menanam tanaman kopi pada lahan yang mereka kelola. Selain itu masyarakat juga menanam beberapa tanaman buah seperti durian, pisang dan pete. Dari tanaman tersebut masyarakat baru bisa merasakan manfaat ekonomi dari tanaman durian dan pete setelah tanaman berbuah yaitu sekitar 5-6 tahun dari masa tanam. Sedangkan untuk tanaman pohon pisang masyarakat baru bisa memanen setelah 7-10 bulan. Untuk tanaman jagung dan kedelai membutuhkan waktu 3-4 bulan dan tanaman kopi membutuhkan waktu satu tahun untuk dapat dipanen. Harga yang dipatok untuk tanaman tersebut tergantung dari harga yang berlaku dipasaran dan lokasi tanaman. Karena biasanya tanaman seperti durian dan pisang tersebut dibeli dengan sistem *tebasan* yaitu sistem jual beli tanaman ketika buah masih berada dipohon yang oleh pembeli dipetik sendiri ketika akan dijual.

Tabel 1. Pendapatan masyarakat dari hasil tumpangsari

No	Nama	Tanaman pokok tumpangsari	Luas petak lahan (Ha)	Hasil tumpangsari (tiap tahun)
1.	Suyono	Kopi	1,5	19.000.000
		Durian dan pisang		5.000.000
2.	Sakur	Kacang	0,08	3.600.000
		Pisang		500.000
3.	Toyyib	Kacang	0,16	7.500.000
		Durian		1.500.000
4.	Wafi	Kacang	0,08	4.000.000
		Pisang		500.000
5.	Halil	Kopi	1	13.000.000
		Durian		3.500.000
6.	Agus	Kopi	0,5	6.700.000
		Pisang dan Pete		2.000.000
7.	Jakfar	Kopi	1,25	16.000.000
		Durian		3.500.000
8.	Sadi	Kopi	1	13.500.000
		Durian dan Pete		4.000.000
9.	Mustofa	Jagung	0,16	7.200.000
		Durian		1.000.000
10.	Bahrul	Kopi	0,25	7.000.000
		Durian dan Pisang		2.000.000

Sumber: Data diolah, 2020.

Selain memperoleh pendapatan dari hasil tumpangsari, masyarakat juga memperoleh pendapatan dari hasil menjadi buruh hutan. Mereka biasanya bekerja dengan disuruh oleh pemilik petak lahan untuk menggarap lahan mereka. Seperti membersihkan lahan, menanam, memupuk, memanen dan tebasan. Dari hasil menjadi buruh tersebut biasanya mereka diberi upah Rp35.000,00 – Rp50.000,00 dalam sehari tergantung waktu mereka bekerja. Jika masyarakat

bekerja dari jam 07.00 sampai jam 13.00 biasanya diberi upah sebesar Rp35.000. Sedangkan jika lembur sampai sore sekitar jam 16.00 diberi upah sampai 50.000. Berikut tabel pendapatan informan penelitian dari buruh tani.

Tabel 2. Pendapaan dari buruh hutan

No	Nama	Pendapatan yang diperoleh (per bulan)
1.	Sakur	950.000
2.	Toyyib	800.000
3.	Wafi	1.000.000
4.	Agus	800.000
5.	Sadi	900.000
6.	Mustofa	950.000
7.	Bahrul	800.000

Sumber: data diolah, 2020

Sebagian besar masyarakat Desa Badean sangat merasakan dampak terhadap adanya program PHBM. Manfaat yang sangat mereka rasakan yaitu terhadap perubahan ekonomi. Dari data di atas dapat diketahui bahwa setelah adanya program PHBM pendapatan masyarakat menjadi lebih besar. Hal tersebut didapat dari hasil tanaman tumpangsari seperti kopi, jagung, kacang, durian, pisang, dan pete. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh pendapatan dari bekerja sebagai buruh hutan.

Selain memperoleh hasil dari tumpangsari dan buruh hutan masyarakat juga memperoleh hasil dari hasil *sharing* tebangtan tanaman pokok. Selama ini LMDH Wana Jaya Negara masih belum pernah mendapatkan *sharing* dari hasil tebangtan. Karena di wilayah pangkuan desa (wengkon) LMDH masih baru saja melakukan tebangtan. Sehingga hasil *sharing* masih belum bisa dibagikan oleh Perum Pehutai kepada LMDH Wana Jaya Negara. LMDH Wana Jaya Negara hanya memperoleh bagi hasil dari hasil penjarangan. Dari hasil tebangtan penjarangan tersebut LMDH Wana Jaya Negara memperoleh bagi hasil sebesar Rp 1.000.203,00. Hasil tersebut dimasukkan ke kas LMDH. Uang tersebut sengaja masih belum digunakan karena masih menunggu uang hasil *sharing* dari tebangtan agar bisa dibagikan ke anggota dan bisa digunakan untuk kegiatan sosial.

B. Dampak Sosial

a. Pendidikan masyarakat

Pendidikan masyarakat sebelum adanya program PHBM di Desa Badean masih rendah. Sebagian besar pendidikan masyarakat hanya mengenyam pendidikan sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Hal tersebut dikarenakan biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mahal sedangkan perekonomian masyarakat rendah pada saat itu menjadi salah satu faktor sehingga mereka tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut pernyataan dari salah satu informan penelitian

“Saya dulu ingin melanjutkan sekolah ke SMP tapi orang tua saya dulu tidak mempunyai biaya untuk menyekolahkan saya. Jangankan untuk menyekolahkan saya, untuk makan sehari-hari saja itu kalau dulu masih ngutang mas.” (Sy, 43).

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa sebelum adanya program PHBM masyarakat merasa kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hal tersebut dikarenakan alasan ekonomi. Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan informan lainnya.

Tabel 3. Data Pendidikan Masyarakat Desa

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun 2006	Tahun 2019
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	43	97
2.	Sekolah Dasar (SD)	265	458
3.	SLTP	157	295
4.	SLTA	105	315
5.	Perguruan Tinggi	-	21
Jumlah		570	1.186

Data : Desa Badean, 2020.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Badean setelah adanya program PHBM lebih baik dibandingkan pada tahun 2006 ketika PHBM masih belum dilaksanakan. Perubahan tingkat pendidikan dapat dilihat dari tingkatan SLTP dan SLTA dimana pada tahun 2006 jumlah siswa yang lulus dibangu Sekolah Dasar yaitu 265 orang sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 458 orang. Pada tingkat SLTP juga mengalami peningkatan yaitu dari 157 menjadi 295 orang. Sedangkan jumlah masyarakat yang lulus pada tingkat SLTA juga mengalami peningkatan dimana pada tahun 2006 berjumlah 105 orang dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 315 orang. Hal tersebut menandakan bahwa kegiatan PHBM telah memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendidikan di Desa Badean. Peningkatan pendidikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan dan meningkatnya perekonomian masyarakat sehingga mampu untuk dapat melanjutkan pendidikan keluarganya ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Hubungan masyarakat dengan Perum Perhutani

Pengelolaan hutan yang baik harus bisa melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Agar pengelolaan hutan tersebut dapat berjalan dengan baik perlu adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan petugas Perum Perhutani. Sebelum adanya pogram PHBM pengelolaan hutan sepenuhnya dikelola oleh Perum Perhutani. Sistem tersebut nyatanya malah membuat hutan menjadi tidak terawat dengan baik. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan pencurian kayu dan penebangan pohon secara liar. Hal tersebut mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Terdapat pula masyarakat yang melakukan kerusakan hutan tanpa mereka sadari bahwa tindakan mereka ternyata melanggar aturan seperti menggembala hewan ternak di hutan secara sembarangan. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat tidak mempunyai wawasan yang luas tentang kehutanan. Tidak jarang pula petugas memberikan hukuman kepada masyarakat yang ketahuan sedang mencuri kayu di hutan atau melakukan penegembalaan liar. Tidak sedikit pula masyarakat yang melawan petugas. Hal tersebut menyebabkan hubungan antara masyarakat desa hutan dan petugas Perum Perhutani tida baik.

Setelah adanya program PHBM, masyarakat mulai dilibatkan dalam pengelolaan hutan. Masyarakat diberikan hak untuk dapat mengelola hutan dengan baik. Masyarakat juga diberikan lahan agar mereka dapat memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami sehingga hasilnya nanti dapat menambah pendapatan masyarakat. Semenjak adanya program PHBM, hubungan masyarakat desa hutan Desa Badean dengan petugas Perum Perhutani semakin membaik.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan program PHBM bertujuan untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya hutan dan menyejahterakan masyarakat. Hutan dapat memberikan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan baik manfaat kesehatan, manfaat ekonomi, serta dapat memberikan tambahan devisa bagi negara

(Salim, 1997:38). Dalam pelaksanaannya program PHBM melibatkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya hutan. Salah satu ciri khas dari sistem kehutanan masyarakat yaitu masyarakat diberikan hak yang sah dalam mengelola sumberdaya hutan serta pengelolaan hutan mensinergikan tujuan-tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat desa hutan (Suharditjo dalam Supratman dan Alan, 2009:19).

Pemerintah telah berupaya agar manfaat hutan dapat dirasakan oleh masyarakat maupun negara, dimana hutan dapat memberikan manfaat yang sangat penting bagi kehidupan baik manfaat kesehatan, manfaat ekonomi, serta dapat memberikan tambahan devisa bagi negara (Salim, 1997:38). Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi, maka perlu adanya suatu sistem pengelolaan hutan dengan baik. Menurut Damanik (2019:4) kebijakan pengelolaan hutan perlu untuk melibatkan masyarakat dalam suatu program yang dibuat oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai konsumen, melainkan juga sebagai produsen dengan melibatkan mereka dalam proses pembuatan dan perumusan program pengelolaan hutan, sehingga masyarakat mempunyai tanggungjawab atas pengelolaan hutan serta memiliki motivasi untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan pelaksanaan berikutnya. Maka untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di kawasan hutan baik secara lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat desa hutan maka pemerintah melalui Perum Perhutani membuat program PHBM dalam mengelola hutan, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dalam kegiatan pengelolannya. PHBM dibentuk dengan tujuan menjadikan hutan lestari dan menyejahterakan rakyat, dimana dalam pelaksanaannya masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Program PHBM sendiri mulai diberlakukan pada tahun 2001. Pada implementasinya setiap daerah mulai menerapkan PHBM secara bertahap. Pada Perum Perhutani KPH Jember sendiri program PHBM mulai diterapkan semenjak tahun 2004. Pada saat itu setiap daerah yang menjadi wilayah kerja Perum Perhutani KPH Jember mulai menerapkan sistem tersebut. Sedangkan Desa Badean yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah kerja Perum Perhutani KPH Jember baru menerapkan program PHBM pada tahun 2006.

Dalam pelaksanaannya program PHBM dilakukan oleh Perum Perhutani bekerjasama dengan masyarakat desa hutan melalui wadah yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). LMDH mempunyai peranan penting dalam keberhasilan kegiatan PHBM, karena program PHBM sendiri merupakan bentuk kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan yang diwadahi oleh LMDH dalam melakukan pengelolaan sumberdaya hutan. LMDH mempunyai peran untuk menjembatani kepentingan Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan implementasi program PHBM di Desa Badean berjalan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan panduan dalam pelaksanaan kegiatan PHBM. Pada tahap sosialisasi, petugas Perum Perhutani melakukan kegiatan sosialisasi dengan melakukan pendekatan kepada *stakeholder* serta tokoh masyarakat sekitar agar mereka turut membantu dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi sangatlah penting dilakukan agar program tersebut dapat dikenal oleh masyarakat serta mendapat dukungan dari masyarakat. Kemudian masyarakat dibimbing oleh Perum Perhutani untuk membentuk LMDH. Lembaga tersebut bertujuan untuk mewadahi aspirasi masyarakat desa hutan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya hutan serta untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan Perum Perhutani. Setelah LMDH terbentuk, masyarakat dan perhutani membuat suatu kesepakatan perjanjian kerjasama (PKS) dalam melakukan pengelolaan sumberdaya hutan. Surat perjanjian tersebut yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Setelah perjanjian tersebut disetujui bersama barulah masyarakat dapat melakukan kegiatan di hutan serta dapat memperoleh hak untuk dapat mengelola kawasan hutan sesuai dengan petak lahan yang telah ditetapkan. Dalam PKS tersebut dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan, hak dan

kewajiban masing-masing pihak hingga pada sistem bagi hasil. Dalam pelaksanaannya masyarakat diberdayakan dengan memberikan pengetahuan modal sosial kepada masyarakat agar mencapai kesejahteraan sosial (Damanik, 2009: 1-2). Dalam hal ini masyarakat diberikan hak untuk dapat mengelola petak lahan, diberikan pengetahuan seputar kehutanan sebagai bekal masyarakat agar dapat mengelola hutan dengan baik dan benar. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim money dari Perum Perhutani untuk melihat perkembangan pelaksanaan program PHBM. LMDH Wana Jaya Negara dinilai telah berhasil dan baik dalam mengimplementasikan program PHBM di Desa Badean hal tersebut dilihat dari baiknya pengelolaan yang dilakukan oleh LMDH baik dari segi administrasi, abyek atau kawasan hutan pangkuan, serta aksesibilitas dikawasan hutan tersebut.

Pelaksanaan program PHBM di LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean telah mampu memberikan dampak yang baik bagi masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan adanya program PHBM perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Hal tersebut dikarenakan masyarakat diberikan hak untuk dapat mengelola lahan di hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Oleh masyarakat petak lahan tersebut ditanami tanaman palawija, seperti jagung dan kacang serta kopi. Dari hasil bercocok tanam tersebut masyarakat memperoleh pendapatan. Selain itu, masyarakat juga merasakan adanya kesempatan kerja yang intensitasnya lebih tinggi. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang mempunyai petak lahan lebar biasanya menyuruh orang lain untuk menggarap lahannya seperti melakukan pembersihan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemanenan. Dari pekerjaan tersebut masyarakat memperoleh upah untuk tambahan ekonomi keluarga. Masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan dari hasil sharing. Akan tetapi untuk LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean masih belum memperoleh bagi hasil hal tersebut dikarenakan wilayah pangkuan LMDH masih baru saja melakukan tebangan, sehingga hasil sharing masih belum bisa diberikan kepada LMDH. Akan tetapi LMDH memperoleh pendapatan dari hasil sharing penjarangan atau tebang pilih yang telah dilakukan oleh Perum Perhutani sebesar Rp.1.000.320,00. Hasil sharing tersebut nantinya akan dikumpulkan dengan hasil sharing tebangan untuk kemudian dibagikan kepada anggota dan untuk kegiatan sosial.

Selain memberikan dampak ekonomi, program PHBM juga berdampak terhadap sosial masyarakat. Dimana pendidikan di Desa Badean mengalami peningkatan. Pendidikan masyarakat yang semulanya rendah kini sudah semakin membaik hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah mampu untuk membiayai anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, hubungan masyarakat dengan petugas Perum Perhutani semakin baik setelah adanya program PHBM. Hal tersebut dikarenakan masyarakat mulai menyadari akan pentingnya menjaga hutan, dan masyarakat juga sudah bisa mendapatkan pendapatan dari hasil tumpangsari dan bekerja menjadi buruh hutan. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk mencuri kayu di hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar pelaksana program (Winarno, 2012:159).

Adanya program PHBM di LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember sudah mampu memberikan dampak yang positif kepada masyarakat desa hutan baik secara ekonomi maupun sosial. (keberhasilan suatu program dapat dilihat dari keadaan sosial dan ekonomi setelah program tersebut dilaksanakan (Winarno, 2012:159). Perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dengan adanya sistem tumpangsari, adanya lapangan pekerjaan, serta dari hasil sharing. Dari sisi sosial, pendidikan masyarakat jadi lebih baik dan hubungan antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat menjadi lebih baik. Selain itu, dengan adanya program PHBM hutan menjadi lebih lestari karena masyarakat turut menjaga hutan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dapat disimpulkan bahwa PHBM merupakan suatu program

pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat desa hutan yang memiliki tujuan untuk menjadikan hutan lestari dan mensejahterakan masyarakat. Dalam implementasinya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan yaitu sosialisasi, pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), perjanjian kerjasama antara perum perhutani dan LMDH. Setelah perjanjian kerjasama disepakati barulah masyarakat bisa melakukan kegiatan sesuai dengan isi dari surat perjanjian kerjasama tersebut. Kemudian dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani untuk melihat perkembangan program tersebut.

Dalam implementasinya masyarakat diberikan hak untuk dapat mengelola petak lahan hutan. Adapun kegiatan yang dilakukan masyarakat diantaranya penanaman baik tanaman pokok maupun tanaman tumpangsari, pemeliharaan tanaman, pemanenan tanaman tumpangsari, dan tebangan. Dalam melaksanakan kegiatan, masyarakat di koordinir oleh LMDH. LMDH mempunyai peran untuk menjembatani kepentingan antara masyarakat desa hutan dan Perum Perhutani di LMDH Wana Jaya Negara Desa Badean kendala yang dirasakan yaitu rendahnya sumberdaya manusia masyarakat desa hutan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan administrasi.

Program PHBM memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat desa hutan. Adapun dampak ekonomi yang dirasakan yaitu pendapatan masyarakat meningkat, adanya kesempatan kerja, dan bisa mendapatkan untung dari hasil *sharing*. Hal tersebut dikarenakan masyarakat diberikan hak untuk dapat mengelola lahan hutan untuk dijadikan lahan pertanian dan hasil yang didapat dari bertani menjadi milik masyarakat. Adanya kegiatan di dalam hutan seperti penanaman, pemeliharaan, dan penebangan juga memberikan kesempatan masyarakat untuk bekerja dan mendapatkan upah. Sedangkan dari segi sosial, pendidikan masyarakat desa hutan meningkat dan hubungan antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius
- Awang, *et al.*. 2008. *Panduan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)*. Bogor. CIFOR.
- Damanik, S. E. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Hutan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rachmadi, H.S. 2010. *Penyempurnaan: Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*. Surabaya: Perum Perhutani Unit II Jawa Timur.
- Salim. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- SK Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009
- Supratman dan Alan, S. 2009. *Manajemen Hutan*. Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanudin.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.